



PELAKSANAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK EKONOMI KREATIF

Dini Yuliani¹, Irfan Nursetiawan², Otong Husni Taufiq³, Ii Sujai⁴

^{1,2,3,4} Universitas Galuh

email: diniasyari16@unigal.ac.id¹

Article History :

Received 15 Agustus 2023
Received in revised form
22 Agustus 2023
Accepted 10 September 2023
Available offline 30 November 2023
Available online 30 November 2023

Language Transcript :

Indonesia (ID)

Key Words : Collaborative

Governance; Kelompok Ekonomi Kreatif; Kolaborasi Multi-Pihak; Keberlanjutan

Abstract – *Kajian ini*

menginvestigasi peran dan implementasi collaborative governance dalam pengembangan kelompok ekonomi kreatif di perdesaan. Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dianggap sebagai fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap struktur dan dinamika kolaborasi antarpihak yang terlibat dalam proses pengembangan kelompok ekonomi kreatif. Metodologi kajian ini mencakup survei, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang bagaimana collaborative governance diterapkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pelaksanaan program dalam pengembangan kelompok ekonomi kreatif. Selain itu, akan dipertimbangkan juga faktor-faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas collaborative governance dalam konteks ini. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dalam terkait strategi terbaik untuk mengoptimalkan collaborative governance dalam mendukung pertumbuhan kelompok ekonomi kreatif. Implikasi temuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

1. PENDAHULUAN

Kreativitas masyarakat di Indonesia pada dasarnya sangat beragam, berbagai dukungan sumber daya menjadi modal besar dalam mengembangkan industri kreatif. Dukungan sumber daya ini belum sepenuhnya dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan bagi peningkatan kesejahteraannya masyarakat. Tetapi produktifitas industri kreatif di Indonesia belum maksimal dan masih tertinggal jauh dari negara lain, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya yang mampu mendorong pengembangan kreativitas masyarakat agar produknya memiliki nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya. Meskipun

pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia sendiri mengalami peningkatan, berdasarkan data BPS tahun 2019, lima provinsi teratas dengan pelaku ekonomi kreatif adalah Jawa Barat 28%, Jawa Timur 28%, Jawa Tengah 27%, DKI Jakarta 9% dan Sumatera Utara 8% (Data BPS, 2019).

Pergeseran tataran kehidupan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi mampu membawa perubahan signifikan. Termasuk dalam sistem perekonomian masyarakat, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi terhadap perkembangan kreativitas dan inovasi sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dan nilai tambah. Faktor produksi utama dalam

sistem ekonomi ini adalah dengan memaksimalkan pengetahuan, ide, kreativitas dan pengembangan informasi, sehingga ini menjadi pilihan yang potensial sebagai sebuah usaha ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu alternatif pilihan yang mampu menggeser sistem ekonomi konvensional yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi ini (Mahmud Syarif dan Ayu Azizah: 2015). Dengan sumber daya alam yang melimpah, jika tidak ditunjang dengan pengembangan kapasitas pelaku industri ekonomi kreatif maka dikhawatirkan hanya akan menjadi penjual jasa saja dan hanya menjadi tukang di rumah sendiri. Perlu adanya komodifikasi dalam berbagai segi kehidupan termasuk aspek industri kreatif agar mampu bertahan di era globalisasi ini (Simeon, 1976);(Horkeimer and Adorno: 2017, 867).

Bentuk perhatian pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif diantaranya adalah dengan merubah nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui Perpres RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Dengan perubahan tersebut diharapkan perekonomian daerah di seluruh wilayah Indonesia disokong oleh usaha industri kreatif (Pangestu: 2018, 29). Penguatan bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif oleh pemerintah melalui PERPRES tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025 sebagai acuan bagi pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pilihan yang relevan dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan yang tercantum dalam Aliena IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah membuat kebijakan yang berpihak dan mampu mensejahterakan masyarakat (Yuliani, et.all., 2020). Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah saja, pembangunan yang dilaksanakan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 bahwa pemerintah desa harus merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan berbagai elemen di masyarakat. Desa mandiri sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa menggunakan berbagai potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan desa untuk menopang pembangunan daerah dan nasional (Nursetiawan, 2018).

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini adalah keterbatasan akses bagi mobilitas perekonomian masyarakat. Baik dari aksesibilitas jalan, akses teknologi informasi, akses untuk mendapatkan bahan produksi serta keterbatasan jejaring atau mitra. Ini perlu perhatian khusus yang terstruktur dari semua elemen diantaranya pemerintah, akademisi, masyarakat dan pihak swasta dalam upaya pengentasan permasalahan perekonomian di perdesaan. Desa Sukamaju memiliki 62 pelaku usaha ekonomi kreatif yang potensial (Data Potensi Desa, 2021) yang diwadahi dalam "Komunitas Ekonomi Kreatif Cibaruyan" (SK Dinas Pariwisata Nomor 061.6/KPTS.075/Dispar.02/2021 Tentang Pembentukan Komunitas Ekonomi Kreatif Cibaruyan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis), terdiri dari pelaku usaha kuliner olahan, seni pertunjukan, seni kriya, dan seni musik direktor. Pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Sukamaju belum mengalami peningkatan secara signifikan sehingga tingkat keberlangsungan dan berkelanjutan usaha ekonomi kreatif tersebut belum optimal.

Masing-masing pihak memiliki peran, peran pemerintah menurut istilah Walls & Dollery (2002 : 76-85) adalah sebagai *activist*. Keberhasilan suatu program dapat meningkat apabila didukung oleh kualitas kelembagaan (Kurniasih, et.all., 2017). Perlu peran serta dari masyarakat sebagai kelompok dalam kelembagaan masyarakat untuk mengelolanya. Masyarakat sebagai pengelola kelembagaan masih kesulitan dalam memanfaatkan dan mengelolanya untuk menghasilkan luaran yang diharapkan. Di pihak lain pemerintah sebagai

fasilitator belum mampu memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga perlu pihak lain yang memiliki kesamaan kepentingan dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif di perdesaan, salah satunya adalah peran akademisi dan swasta. Konsep yang digunakan dalam kajian untuk melihat bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak lain dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Sukamaju adalah teori *collaborative governance*. Konsep kolaborasi pemerintahan menurut Ansell dan Gash (Islamy, 2018: 81) adalah adanya keterlibatan lembaga publik dengan lembaga lain dalam proses perumusan kebijakan untuk kepentingan bersama dengan pelibatan banyak aktor di luar pemerintah yang memiliki kesamaan orientasi pada kepentingan bersama untuk melaksanakan suatu kebijakan dan mengelolanya secara bersama-sama.

Dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah tidak bisa melaksanakannya sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam kebijakan tersebut. Era disrupsi sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang terus mengarah pada perubahan yang signifikan, memaksa semua pihak untuk saling bekerja sama termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, keterlibatan pihak lain selain pemerintah sangat di perlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Syaeful Islamy, 2018: 81) bahwa kerja sama antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik dengan partisipasi banyak pemangku kepentingan pemerintah dan LSM dalam proses pengambilan kebijakan yang fokus pada konsensus, dan adanya pembagian peran untuk bersama-sama melaksanakan suatu kebijakan atau program. Konsep model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash adalah kondisi awal terjadinya kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena yaitu adanya kesamaan kepentingan dan visi yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan,

sejarah kerjasama yang lalu.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance*, menurut Ansell dan Gash dalam Purnomo, et.all (2018) terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Dialog langsung (*face to face dialogue*). Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, dialog langsung atau tatap muka diperlukan untuk meminimalisir konflik dan ketidakpercayaan antar pihak untuk mencapai tujuan dan manfaat program atau kegiatan.
2. Membangun kepercayaan (*trust building*). Kerjasama atau kolaborasi tidak hanya sekedar proses negosiasi antar pihak yang berkepentingan tetapi juga harus membangun kepercayaan berbagai pihak. Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi harus dilakukan sejak awal program/kegiatan, untuk menghindari berkembangnya sikap egois.
3. Komitmen terhadap proses (*commitment to the process*). Memotivasi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi langsung dalam suatu program atau kegiatan merupakan hal yang penting dalam kolaborasi antar pihak.
4. Pemahaman bersama (*shared understanding*). Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program harus mempunyai kesamaan pemahaman mengenai visi, misi, dan tujuan untuk mencapai konsensus dalam penafsiran suatu masalah.
5. Hasil sementara (*intermediate outcomes*). Luaran kegiatan harus bersifat nyata, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang kritis dan bersifat mendasar dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi.

Terdapat 8 (delapan) indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) menurut De Seve (dalam Sudarmo, 2011 : 110-116), yaitu sebagai berikut : struktur jaringan, komitmen untuk tujuan bersama, kepercayaan diantara para peserta, pemerintahan, akses kepada yang memiliki kewenangan, akuntabilitas (tanggung jawab

distributif), berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan industri yang menggunakan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu sehingga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Industri kecil kreatif digambarkan sebagai sebuah rumah yang harus mempunyai landasan yang kokoh, karena landasan inilah yang akan menunjang keberadaan atau berjalannya industri kecil yang unggul. Menurut Alvin Toffler dalam bukunya *Future Shock* (1970), peradaban ekonomi terbagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah ekonomi pertanian, gelombang kedua adalah ekonomi industri, dan gelombang ketiga adalah ekonomi informasi. Prediksi gelombang selanjutnya adalah gelombang ekonomi kreatif menuju ide dan pemikiran inovatif (Nenny Anggraini: 2008, 144).

Inti pokok dari industri kreatif adalah kemampuan seni dan kreativitas dalam menciptakan sebuah karya yang estetik dengan memanfaatkan kemampuan individu dalam mengkreasi hasil karya ciptanya. Karakteristik ekonomi kreatif adalah lebih memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan bakat yang dimiliki individu, sehingga mampu menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan kemampuan kreatif dan kreativitas individu (I Gusti Bagus Arjana: 2016, 227).

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu. Teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, identifikasi informan penelitian ini melalui teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan informan terpilih untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Selama pengumpulan data, wawancara

mendalam dan wawancara diskusi kelompok terfokus (FGD) digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dan juga didukung oleh studi literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara bersamaan oleh peneliti di lapangan sejak awal pengumpulan data, secara mendalam. Dengan teknik analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992), melalui 4 tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance sebagai suatu pengaturan yang dilakukan pemerintah dengan mengajak pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan bersama dalam forum formal berdasarkan konsensus. Ada kebebasan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik (Ansell dan Gash, 2007). Berdasarkan hal tersebut maka suatu daerah akan berkembang apabila semua pihak baik dari pemerintahannya, masyarakatnya maupun pihak lain dapat saling mendukung untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kabupaten Ciamis dalam hal ini memiliki potensi alam yang luar biasa, yang tentunya apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dapat membantu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kemajuan suatu wilayah didukung oleh kemajuan dan perkembangan di lingkungan desa sebagai wilayah otonomi yang paling dekat dengan masyarakatnya. Tentunya dukungan berbagai sumber daya baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pemerintahannya sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya masyarakat di desa itu sudah memiliki daya juang yang tinggi untuk keberlangsungan kehidupannya, tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satunya adalah dukungan kebijakan yang belum tepat sasaran untuk mendukung kreatifitas masyarakat desa dalam memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Desa

Sukamaju, dilihat dari beberapa dimensi tahapan pelaksanaan *collaborative governance* yang melibatkan beberapa lembaga diantaranya ada peran dari pemerintah desa, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis sebagai penanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Ciamis, Perguruan Tinggi, pihak swasta yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa, serta kelompok ekonomi kreatif di Desa Sukamaju. Pendekatan *collaborative governance* dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh *stakeholders* serta memberikan kontribusi dalam rekomendasi pemecahan masalah tersebut.

Aktor dalam *collaborative governance* pengembangan ekonomi kreatif di Desa Sukamaju adalah pemerintahan desa, perguruan tinggi, Dinas Pariwisata dalam hal ini adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis, Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif Desa Sukamaju, kelompok organisasi kepemudaan desa, serta ada beberapa pihak swasta yang memfasilitasi program pelatihan untuk kelompok ekonomi kreatif di Desa Sukamaju. Peran BP2D Kabupaten Ciamis dalam pengembangan ekonomi kreatif lebih pada aspek untuk membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat untuk mau belajar berwirausaha. Kelompok ekonomi kreatif yang dibentuk oleh pemerintah desa bertujuan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kondisi yang sesungguhnya untuk saling memotivasi dalam kegiatan berwirausaha. Sedangkan pemerintah desa memiliki fungsi dan peran dalam upaya mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat serta dalam proses pembuatan kebijakannya. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* sangat diperlukan dialog tatap muka (*face to face dialogue*) antar pemangku kepentingan, sehingga ketidakpercayaan dan pertentangan di masyarakat dapat diminimalisir. Hal ini yang terjadi di Desa Sukamaju, melalui beberapa program kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah desa dan lembaga perguruan tinggi sebagai tim pendampingan desa melakukan beberapa upaya agar terjalin komunikasi antara

kelompok ekonomi kreatif di desa Sukamaju dengan beberapa *stakeholders* untuk membuka peluang pengembangan dan juga pengakuan terhadap usaha ekonomi kreatif di Desa Sukamaju.

Proses kolaborasi yang terjadi tidak hanya sekedar pada proses negosiasi antara beberapa pihak yang berkepentingan. Lebih dari itu adalah membangun kepercayaan antar para pihak (*trust building*) dari mulai awal kegiatan atau program dirancang untuk menghindari munculnya sikap egosentris. Karena dalam program pengembangan ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya manusia dari wilayah sendiri itu sangat tinggi. Upaya membangun kepercayaan diri para pelaku usaha ekonomi kreatif di Desa Sukamaju terus dilakukan, dan pemerintah desa memiliki peran yang sangat dominan, sehingga pemberdayaan masyarakat yang terjadi masih berupa implementasi program dari pemerintah daerah sendiri.

Tujuan dari pengembangan ekonomi kreatif di Desa Sukamaju adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri tanpa pengecualian, sehingga perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai luhur yang ada di Desa Sukamaju. Komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) pemberdayaan di Desa Sukamaju yang diwujudkan dalam program-program pelatihan baik yang dilakukan atas inisiasi pemerintah desa maupun permintaan dari masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk membekali keterampilan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan. Keterlibatan dari pihak swasta (*public sector*) belum terlibat secara utuh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Sukamaju selain melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat, juga melibatkan peran perguruan tinggi untuk kajian ilmiah sebagai bahan dalam kepentingan perumusan kebijakan pemerintah. Kolaborasi antar perguruan tinggi dengan pemerintah desa adalah dalam penguatan rencana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya melalui masukan, kritikan dan tentunya kajian ilmiah sebagai bentuk pendampingan dari perguruan tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah

program harus memiliki kesepahaman untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pemecahan permasalahan di masyarakat (*shared understanding*).

Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Sukamaju diantaranya adalah pelatihan-pelatihan, kunjungan sebagai usaha studi banding dengan kegiatan yang hampir serupa untuk membangun sikap kritis dalam upaya meningkatkan semangat nilai kepedulian, kemandirian, kebersamaan melalui nilai gotong royong agar memiliki sikap mandiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha yang dirancang untuk mengembangkan momentum dalam upaya pembimbingan dan pendampingan agar suatu kolaborasi dapat berhasil.

4. SIMPULAN

Hasil implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Sukamaju masih belum menggambarkan konsep kolaborasi antar aktor yang terlibat di dalamnya. Karena masih ada dominasi salah satu aktor atau pihak yaitu peran dari pemerintah desa dan daerah, yang pada akhirnya sulit untuk menghilangkan ketergantungan dari pelaksana program yaitu para pelaku usaha ekonomi kreatif. Salah satunya karena budaya masyarakat yang masih sangat tergantung dengan bantuan pemerintah dan pihak lain sehingga perubahan moral dan *political will* belum terbangun untuk memperkuat modal sosial di masyarakat.

Ketidak optimalan implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Sukamaju salah satunya disebabkan oleh perbedaan karakter masyarakat, pemahaman dan juga pola pikir dari seluruh komponen aktor dalam *collaborative governance*. Terdapat beberapa rekomendasi, yaitu: [1] Perlu adanya penguatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat karakter masyarakat melalui internalisasi nilai, pelebagaan nilai, dan pendampingan yang bersifat partisipatif; dan [2] Perlu adanya upaya untuk percepatan pencapaian tujuan program pemerintah yang dibangun dengan model

collaborative governance melalui keterbukaan antar kelompok masyarakat, partisipatif, responsif, akuntabel dan terintegrasi agar program kegiatan dapat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik, Kebijakan Publik. Bandung, Indonesia: CV. Pustaka Setia.
- Ansell, C. & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, hlm. 1-29.
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2017. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran).
- Daswati, D., Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2020). Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(2), 229-242.
- Djarmiko, A., Syarifuddin, D., Raharja, A. B., & Fitriani, S. A. (2021, April). Assessment of local communities capacities on developing ethnographic tourism of Kampung Naga, West Java, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 737, No. 1, p. 012059). IOP Publishing.
- Djarmiko, A., Syarifudin, D., Priyandoko, Z., Lisanti, M., & Diena, T. K. (2021). Development of Creative Handicrafts Industrial Zones in Rajapolah District, Tasikmalaya Regency: Spatial Recommendation for Village Areas. *Geosfera Indonesia*, 6(3), 398-425.
- Firdausy, M. Carunia. 2018. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia. Surabaya: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herlina, E., Mulyatini, N., & Syarifudin, D. (2023). Pengembangan Desa Wisata Dalam Perspektif Collaborative Planning Berbasis Budaya Di Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis.
- Islamy, Syaeful. 2018. Collaborative

- Governance: Konsep dan Aplikasi: Budi Utama.
- Khasanah, R. P., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 9(1), 29-35.
- Kurniasih, D. (2017). Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi Bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat*. Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rusmini. (2020). Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 624-639.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Simeon, R. (1976). Studying public policy. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, 9(4), 548–580.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publin dan Pemerintahan Kolaboratif (Isu-Isu Kontemporer)*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2019. *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152.
- Triwahyuni, Ika. (2018). Collaborative Governance Dalam Pembangunan pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa” Sulawesi.
- Yuliani, D., Akbar, D. S., Brata, Y. R., Herlina, E., & Budiawan, A. (2020). Education, Health, Fiscal Decentralization & Poverty: Evidence in One of The Areas in Indonesia. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, 5(1).

